

Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Banggai

Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Management in Banggai Regency

Lilis Safitri S. Towendo¹, Amir Buhang^{2*}

¹Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tompotika Luwuk Banggai

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tompotika Luwuk Banggai

*²Email : amirbuhang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi Keuangan Daerah di Kabupaten Banggai tahun 2014-2018. Jenis data yang digunakan adalah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta data biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan di analisis dengan menggunakan analisis efektivitas dimana apabila hasil perhitungan di atas 100% maka dikatakan efektif begitu juga dengan efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Banggai apabila hasil perhitungannya di bawah 60% maka penilaiannya sangat efisien. Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan di Kabupaten Banggai didapatkan hasil bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Banggai mencapai kinerja keuangan yang baik yaitu, 103,27% atau mencapai kriteria yang sangat efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahun cenderung tidak efisien dan kurang efisien seperti tahun 2014 sebesar 98,93%, tahun 2015 sebesar 101,04%, tahun 2016, 2017 dan 2018 berturut – turut sebesar 98,14%, 99,47% serta 99,27%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, untuk tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai termasuk dalam kriteria yang baik sedangkan untuk tingkat efisiensi keuangan daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2014 – 2018.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Banggai.

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness and efficiency of Regional Finance in Banggai Regency in 2014-2018. The types of data used are the realization of Regional Original Revenue (PAD), the target of Regional Original Revenue (PAD), as well as data on costs incurred to obtain Regional Original Income (PAD). The data source used is secondary data and is analyzed using effectiveness analysis where if the calculation result is above 100% then it is said to be effective as well as regional financial efficiency in Banggai Regency if the calculation result is below 60% then the assessment is very efficient. Regional Original Income determined in Banggai Regency showed that in 2014 Banggai Regency achieved good financial performance, namely, 103.27% or reached very effective criteria. Regional Original Income (PAD) each year tends to be inefficient and less efficient, as in 2014 at 98.93%, in 2015 at 101.04%, in 2016, 2017, and 2018 respectively at 98.14%, 99.47%, and 99.27%. Thus, it can be concluded that the level of effectiveness of regional financial management in Banggai Regency is included in the good criteria while the level of regional financial efficiency fluctuated from 2014 - 2018.

Keywords: Effectiveness, Efficiency of Regional Financial Management, Banggai Regency.

PENDAHULUAN

Di dalam suatu Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (governance) yang baik. Sistem ini sangat baik di perlukan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah dan sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang di hadapi dengan koridor – koridor kehidupan nasional (Cicilia et al., 2019). Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendaya gunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal (Manopo et al., 2019). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selalu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan harus berupaya untuk menghapus atau mengurangi kemiskinan. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik (Desmawati et al., 2016).

Efektivitas keuangan daerah adalah pengukuran keberhasilan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki / dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak – pihak lain sesuai ketentuan / peraturan dalam pencapaian tujuan – tujuan yang ditetapkan (Machmud, 2014). Efisiensi keuangan daerah adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang atau dengan perkataan lain penggunaan hak dan kewajiban yang sebenarnya di daerah tersebut (Lamonisi, 2016).

Tabel 1. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Banggai (Juta Rupiah), Tahun 2014– 2018

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Pengeluaran (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	859.062	-	849.943	-
2015	1.010.144	(18)	1.020.712	(17,37)
2016	1.198.950	30,06	1.176.601	24,19
2017	1.365.176	27,29	1.357.973	30,88
2018	1.663.633	26,88	1.651.569	22,52

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2018

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Santoso (2011) dengan judul “Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi”. Hasil analisis efisiensi pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa perhitungan dan formulasi tingkat efisiensi secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 97,53%, ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah karena hasilnya kuang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya. Sedangkan hasil analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa perhitungan dari formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kab, Ngawi tahun 2005 – 2010 berfluktuasi dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 94,03%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Kab. Ngawi adalah sudah efektif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Banggai dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Banggai.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data APBD Kabupaten Banggai yang didalamnya terdapat komponen-komponen : pendapatan daerah, belanja daerah, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan hasil bukan pajak, bantuan, sumbangsih subsidi, Dana Alokasi Umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan numerik sebagai hasil pengukuran tertentu (Salindeho, 2016). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hutagalung, 2019).

Tabel 2. Teknik Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Alat Ukur
1.	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan	Persen (100%)
2.	Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persen (100%)

Sumber : (Kesek, 2013)

Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Rasio Efektivitas)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60–80	Kurang efektif
< 60	Tidak efektif

Sumber : (Trianto, 2016)

Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan (Rasio Efisiensi)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100	Tidak efisien
90 – 100	Kurang efisien Efisien
80 – 90	Cukup efisien
60 – 80	Efisien
< 60	Sangat efisien

Sumber : (Kurrohman, 2013)

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas, yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Ardila & Putri, 2015).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian di atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%. Rasio Efisiensi, Efisiensi diukur dengan ratio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Sri et al., 2019). Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Banggai Tahun 2014 – 2018

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2014	831.835	859.062	103,27
2015	987.015	1.010.144	102,34
2016	1.167.587	1.198.950	102,68
2017	1.434.934	1.365.176	95,14
2018	1.680.582	1.663.633	98,99

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 6. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai 2014 – 2018

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Efisiensi (%)
2014	859.062	849.943	98,93
2015	1.010.144	1.020.712	101,04
2016	1.198.950	1.176.601	98,14
2017	1.365.176	1.357.973	99,47
2018	1.663.633	1.651.569	99,27

Sumber : Data Hasil Olahan

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan adalah: Pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai selama periode lima tahun yaitu tahun 2014 – 2018 cenderung stabil, dari hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai tahun 2014 – 2018 dalam kategori efektif dan sangat efektif. Pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banggai selama tahun 2014 sampai 2018 cenderung mengalami fluktuasi, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai termasuk dalam kriteria tidak efisien dan kurang efisien, artinya bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
<https://doi.org/10.30596/JRAB.V15I1.428>

- Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17(2). <https://doi.org/10.35794/JPEKD.10245.17.2.2015>
- Desmawati, A., Zamzami, Z., & Zulgani, Z. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i1.2638>
- Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa Pembiayaan Gadai Emas Di PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, 1(1), 116–126. <https://doi.org/10.22303/AL-QASD.1.1.2016.116-126>
- Kesek, F. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.4.2013.3400>
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/jda.v5i1.2558>
- Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 223–230. <https://doi.org/10.35794/EMBA.4.1.2016.11592>
- Machmud, M. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4181>
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kbpupaten Minahasa Tenggara. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17(2). <https://doi.org/10.35794/JPEKD.10249.17.2.2015>
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 705–716. <https://doi.org/10.35794/EMBA.4.3.2016.14376>
- Sri, V., Cicilia, E., Murni, S., & Engka, D. M. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17(2). <https://doi.org/10.35794/JPEKD.10245.17.2.2015>
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1). <https://doi.org/10.24127/AKUISISI.V12I1.92>